

5. Pelaksanaan Atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan Respon Terhadap Risiko Kecurangan (Triwulan II)

a. Pelaksanaan Atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

No	Pernyataan Risiko	RTP	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
1.	Perubahan jadwal dari penyelenggaraan Festival Keagamaan	Koordinasi secara berkala untuk mengkomunikasikan mengenai jadwal pelaksanaan festival atau kegiatan tersebut	Melakukan koordinasi secara berkala untuk mengkomunikasikan mengenai jadwal pelaksanaan festival atau kegiatan. Yang sudah dilaksanakan untuk kegiatan Nuzulul Qur'an.	Maret 2025
2.	Sinkronisasi jadwal kegiatan sulit dilakukan karena menyesuaikan dengan jadwal dari Dewan	Koordinasi secara berkala dengan pihak terkait	Melakukan komunikasi dan koordinasi dalam penentuan jadwal sosialisasi.	Februari dan Maret 2025
3.	Peserta yang hadir untuk rapat kurang memahami materi diskusi	Memastikan kehadiran peserta H-1 sebelum acara dan komunikasi lebih intensif dengan instansi terkait	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan peserta yang hadir mewakili untuk dapat mempelajari materi yang akan didiskusikan	Triwulan I
4.	Tidak semua pegawai di lingkungan Kepatihan mengikuti layanan Posbindu	Melakukan koordinasi dengan kader Posbindu terkait jadwal pelayanan Posbindu	Melakukan koordinasi dan komunikasi antar kader Posbindu terkait dengan jadwal pelaksanaan Posbindu	Triwulan I
5.	Proses pengumpulan informasi kurang maksimal karena peserta yang terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan peserta dari OPD/elemen masyarakat yang sesuai dengan tema. - Menyiapkan sarana dan prasarana blended meeting yang memadai untuk menambah kuota peserta. - Menyusun alat bantu (google form) dengan isian yang sesuai dengan kebutuhan. 	Membagikan link <i>google form</i> dan mengkomunikasikan kepada seluruh peserta untuk mengisi dan melengkapi data yang diminta.	Triwulan I

6.	Proses pengumpulan data dan informasi kurang optimal	Dilakukan pembahasan progress kegiatan setiap bulannya untuk mengetahui capaian kinerja Tenaga Ahli.	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka merumuskan bahan kebijakan bidang KB/KS dan pengendalian penduduk.	Triwulan I
7.	Peran Tenaga Ahli kurang optimal	Penjadwalan ulang paparan progres dan melakukan pembahasan lebih intensif	Melakukan rapat koordinasi dengan tenaga ahli dalam persiapan kajian Pencegahan dan Penanganan KDRT pada Perempuan dan Anak di DIY.	Triwulan I

b. Pelaksanaan Atas Respon terhadap Risiko Kecurangan

No	Deskripsi Resiko Kecurangan	Respon Terhadap Risiko Kecurangan	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
1.	Korupsi	Menguatkan peran pengawasan internal melalui pembinaan, monitoring dan evaluasi untuk mencegah tindak korupsi	Pengawasan internal dilakukan melalui pembinaan rutin pada apel setiap Senin pagi	Setiap bulan
2.	Pengambilan uang secara tidak sah	Menginstruksikan PPK untuk melakukan monitoring atas setiap nomor transaksi, nilai transaksi dan tujuan pembayaran atas transaksi.	PPK memiliki peranan penting untuk melakukan pengawasan atas transaksi yang berjalan	Setiap bulan
3.	Pembayaran tidak sah	<p>1. Terdapat prosedur rinci mengenai pengajuan pembayaran pengeluaran berupa Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Operasional Prosedur Internal antara lain memuat SOP Pengelolaan Keuangan, SOP Pelaksanaan Akuntansi Keuangan, SOP Penyiapan SPP dan SPM, SOP SPP-UP, SOP SPP-GU, SPP-LS, SOP SPM, dan SOP Pencairan atas Transaksi Tunai dan Non Tunai;</p> <p>2. Terdapat pemisahan fungsi masing-masing pegawai terkait transaksi pengeluaran pada Kelompok Substansi Keuangan, yaitu terdapat Pembantu Penatausahaan Keuangan yang terdiri dari verifikator keuangan dan pembuat laporan akuntansi, Bendahara pengeluaran yang dibantu oleh pengadministrasi keuangan dan pengelola Cash</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan penyesuaian SOP sesuai dengan kegiatan yang terjadi di Biro Kesra. - Menempatkan ketugasan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan adanya pemisahan fungsi masing-masing. - Melakukan pengecekan secara teliti terhadap 	Triwulan I

		<p>Management System (CMS). Selain itu, pada setiap sub bagian terdapat PUMK yang bertugas mengajukan kebutuhan dana kepada bendahara pengeluaran berdasarkan DPA/anggaran kas;</p> <p>3. Verifikasi bukti telah dilakukan oleh masing-masing fungsi namun belum terdapat mekanisme sampling terhadap bukti-bukti mencurigakan untuk dilakukan konfirmasi;</p> <p>4. Terdapat mekanisme penghitungan kembali rincian pengeluaran dengan jumlah total pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran sebelum melakukan pembayaran. Bendahara pengeluaran menggunakan aplikasi SIPD sebagai kendali keuangan yang didukung dengan kertas kerja untuk memastikan bahwa total pengeluaran sama dengan anggaran kasnya;</p> <p>5. Terdapat SK Kepala Dinas terkait Pejabat Pengadaan;</p> <p>6. Bendahara dan pengelola gaji telah mendapatkan pelatihan yang diselenggarakan oleh BPKA D.I. Yogyakarta untuk namun verifikatur dan pembantu bendahara belum mendapatkan pelatihan.</p>	dokumen bukti transaksi dan dokumen lainnya.	
4.	Perencanaan pengadaan barang dan jasa tidak sesuai kebutuhan	<p>1. Menguatkan peran pengawasan internal melalui reviu atas perencanaan pengadaan untuk pencegahan kecurangan perencanaan PBJ;</p> <p>2. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi pencegahan kecurangan kepada pegawai yang terkait dengan perencanaan pengadaan barang dan jasa;</p> <p>3. Penandatanganan pakta integritas bagi pihak yang terkait dalam perencanaan pengadaan aset an persediaan</p>	Melakukan pengawasan internal melalui pembinaan mengenai tata cara perencanaan dan pengadaan barang jasa	Sesuai jadwal pengadaan

6. Laporan SPBE (Triwulan II)

No	Kejadian	Uraian	Langkah Penanganan	Keterangan
	Usulan Aplikasi belum disetujui oleh pemangku kepentingan	Proses pengembangan dan implementasi aplikasi terhambat karena kurangnya dukungan dan persetujuan dari pemangku kepentingan, yang dapat menyebabkan keterlambatan pelayanan atau tidak sesuainya aplikasi dengan kebutuhan pengguna.	Lakukan koordinasi dan sosialisasi untuk menyelaraskan kebutuhan serta mendapatkan persetujuan dari pemangku kepentingan.	Pemantauan per 3 bulan
	Data yang di ada pada website resmi SKPD tidak Update	Masyarakat dan pengguna layanan memperoleh informasi yang tidak akurat atau ketinggalan zaman, yang dapat menurunkan kepercayaan publik dan mempengaruhi pengambilan keputusan.	Tetapkan penanggung jawab pembaruan data dan jadwal rutin pemutakhiran informasi.	Pemantauan per 3 bulan
	Hilangnya data/konten di aplikasi	Kehilangan data dapat mengganggu kontinuitas	Terapkan sistem backup otomatis dan audit data	Pemantauan per 3 bulan

		layanan, menimbulkan kerugian operasional, dan mengurangi akuntabilitas instansi pemerintah jika tidak memiliki cadangan data (backup) yang memadai.	secara berkala untuk mencegah kehilangan informasi penting.	
	Adanya informasi yang salah/tidak akurat (HOAX)	Penyebaran informasi hoaks melalui kanal resmi SPBE dapat menyesatkan masyarakat, merusak reputasi instansi, dan menimbulkan keresahan sosial jika tidak segera ditangani dan diklarifikasi	Perkuat verifikasi konten sebelum publikasi dan siapkan mekanisme klarifikasi cepat melalui kanal resmi.	Pemantauan per 3 bulan

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Daerah,
Ast. Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat,
u.b.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat



Faishol Muslim, S.I.P., M.Si.

Lampiran Surat Permintaan Laporan Pengendalian Gratifikasi, Pengungkapan Dugaan Pelanggaran, Benturan Kepentingan, Kejadian Risiko/Risk Event, Pelaksanaan Atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP), Respon Terhadap Risiko Kecurangan, dan Laporan SPBE di Lingkungan Perangkat Daerah pada Triwulan II Tahun 2025
Nomor : B/700.1.2.14 /1930/BR.8
Tanggal: 17 Juni 2025

Laporan Pemantauan Risiko SPBE Triwulan II

1

Nama Unit : Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY
Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan dan pengelolaan Kesejahteraan Rakyat berbasis elektronik.
Risiko : Kurangnya Dokumen Pendukung

Besaran/Level Risiko SPBE Saat ini dan Proyeksi Risiko SPBE

Risiko SPBE pada triwulan I dan triwulan II berada pada Level Risiko SPBE "rendah" dengan Besaran Risiko SPBE sebesar 6 dimana kemungkinan terjadinya Risiko SPBE tersebut sekitar 7% dalam satu periode (Jarang Terjadi) dan berdampak pada penurunan kinerja hingga 50% (Cukup Signifikan).

Risiko SPBE tersebut kedepannya akan dilakukan penanganan untuk mencapai Selera Risiko SPBE.

Penanganan yang telah dilakukan

-

Rencana Penanganan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
Pemenuhan kelengkapan dokumen rencana anggaran	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY	Semester II

Laporan Pemantauan Risiko SPBE Triwulan II

12

Nama Unit : Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY
Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan dan pengelolaan Kesejahteraan Rakyat berbasis elektronik.
Risiko : Keterbatasan Anggaran Pemerintah Daerah

Besaran/Level Risiko SPBE Saat ini dan Proyeksi Risiko SPBE

Risiko SPBE pada triwulan I dan triwulan II berada pada Level Risiko SPBE "sedang" dengan Besaran Risiko SPBE sebesar 12 dimana kemungkinan terjadinya Risiko SPBE tersebut sekitar 35% dalam satu periode (Sering Terjadi) dan berdampak pada penurunan kinerja hingga 50% (Cukup Signifikan).

Risiko SPBE tersebut kedepannya akan dilakukan penanganan untuk mencapai Selera Risiko SPBE.

Penanganan yang telah dilakukan

-

Rencana Penanganan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
Pencermatan Dokumen Rencana Anggaran dengan memprioritaskan pengadaan Aplikasi pendukung Layanan	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY	Semester II

Laporan Pemantauan Risiko SPBE Triwulan II

6

- Nama Unit : Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY
- Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan dan pengelolaan Kesejahteraan Rakyat berbasis elektronik.
- Risiko : Belum Ada Rencana Terjadwal Terkait Updating Data Pada Webiste

Besaran/Level Risiko SPBE Saat ini dan Proyeksi Risiko SPBE

Risiko SPBE pada triwulan I dan triwulan II berada pada Level Risiko SPBE "rendah" dengan Besaran Risiko SPBE sebesar 4 dimana kemungkinan terjadinya Risiko SPBE tersebut sekitar 7% dalam satu periode (Jarang Terjadi) dan berdampak pada penurunan kinerja hingga 30% (Cukup Signifikan).

Risiko SPBE tersebut kedepannya akan dilakukan penanganan untuk mencapai Selera Risiko SPBE.

Penanganan yang telah dilakukan

-

Rencana Penanganan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
Inventarisasi Kegiatan- Kegiatan an Penjadwalan Updating Data/Konten	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY	Semester II

Laporan Pemantauan Risiko SPBE Triwulan II

12

Nama Unit : Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY
Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan dan pengelolaan Kesejahteraan Rakyat berbasis elektronik.
Risiko : Tidak Adanya Petugas atau Operator Aplikasi

Besaran/Level Risiko SPBE Saat ini dan Proyeksi Risiko SPBE

Risiko SPBE pada triwulan I dan triwulan II berada pada Level Risiko SPBE "sedang" dengan Besaran Risiko SPBE sebesar 12 dimana kemungkinan terjadinya Risiko SPBE tersebut sekitar 35% dalam satu periode (Sering Terjadi) dan berdampak pada penurunan kinerja hingga 50% (Cukup Signifikan).

Risiko SPBE tersebut kedepannya akan dilakukan penanganan untuk mencapai Selera Risiko SPBE.

Penanganan yang telah dilakukan

-

Rencana Penanganan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
Melakukan pengusulan formasi petugas TI dalam regulasi ke OPD terkait, penunjukan petugas dengan surat tugas.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY	Semester II

Laporan Pemantauan Risiko SPBE Triwulan II

8

- Nama Unit : Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY
- Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan dan pengelolaan Kesejahteraan Rakyat berbasis elektronik.
- Risiko : Adanya Pihak Yang Mengenskripsi Data (Hacker)

Besaran/Level Risiko SPBE Saat ini dan Proyeksi Risiko SPBE

Risiko SPBE pada triwulan I dan triwulan II berada pada Level Risiko SPBE "rendah" dengan Besaran Risiko SPBE sebesar 8 dimana kemungkinan terjadinya Risiko SPBE tersebut sekitar 7% dalam satu periode (Jarang Terjadi) dan berdampak pada penurunan kinerja hingga 70% (Signifikan).

Risiko SPBE tersebut kedepannya akan dilakukan penanganan untuk mencapai Selera Risiko SPBE.

Penanganan yang telah dilakukan

-

Rencana Penanganan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
Koordinasi dengan OPD terkait keamanan IT	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY	Semester II

Laporan Pemantauan Risiko SPBE Triwulan II

12

Nama Unit : Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY
Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan dan pengelolaan Kesejahteraan Rakyat berbasis elektronik.
Risiko : Aplikasi Error/Bug

Besaran/Level Risiko SPBE Saat ini dan Proyeksi Risiko SPBE

Risiko SPBE pada triwulan I dan triwulan II berada pada Level Risiko SPBE "sedang" dengan Besaran Risiko SPBE sebesar 12 dimana kemungkinan terjadinya Risiko SPBE tersebut sekitar 15% dalam satu periode (Kadang-Kadang Terjadi) dan berdampak pada penurunan kinerja hingga 70% (Signifikan).

Risiko SPBE tersebut kedepannya akan dilakukan penanganan untuk mencapai Selera Risiko SPBE.

Penanganan yang telah dilakukan

-

Rencana Penanganan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
Koordinasi dengan Mitra Penyedia	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY	Semester II

Laporan Pemantauan Risiko SPBE Triwulan II

10

Nama Unit : Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY
Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan dan pengelolaan Kesejahteraan Rakyat berbasis elektronik.
Risiko : Kesalahan Input Data Sumber Oleh Petugas Penguinput

Besaran/Level Risiko SPBE Saat ini dan Proyeksi Risiko SPBE

Risiko SPBE pada triwulan I dan triwulan II berada pada Level Risiko SPBE "sedang" dengan Besaran Risiko SPBE sebesar 10 dimana kemungkinan terjadinya Risiko SPBE tersebut sekitar 7% dalam satu periode (Jarang Terjadi) dan berdampak pada penurunan kinerja hingga 90% (Sangat Signifikan).

Risiko SPBE tersebut kedepannya akan dilakukan penanganan untuk mencapai Selera Risiko SPBE.

Penanganan yang telah dilakukan

-

Rencana Penanganan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
Memperbaiki dan Menyusun SOP Input Data di Aplikasi	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY	Semester II

Laporan Pemantauan Risiko SPBE Triwulan II

15

Nama Unit : Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY
Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan dan pengelolaan Kesejahteraan Rakyat berbasis elektronik.
Risiko : Kesalahan Pengambilan Sumber Informasi

Besaran/Level Risiko SPBE Saat ini dan Proyeksi Risiko SPBE
Risiko SPBE pada triwulan I dan triwulan II berada pada Level Risiko SPBE "sedang" dengan Besaran Risiko SPBE sebesar 15 dimana kemungkinan terjadinya Risiko SPBE tersebut sekitar 15% dalam satu periode (Kadang-Kadang Terjadi) dan berdampak pada penurunan kinerja hingga 90% (Sangat Signifikan). Risiko SPBE tersebut kedepannya akan dilakukan penanganan untuk mencapai Selera Risiko SPBE.

Penanganan yang telah dilakukan
-

Rencana Penanganan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
Memperbaiki kesalahan dalam pengambilan sumber informasi dan data yang akan digunakan	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY	Semester II

a.n. Sekretaris Daerah,
Ast. Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat,
u.b.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat



Faishol Muslim, S.I.P., M.Si.